



1ST ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE

“Sukuk for Infrastructure Financing and Financial Inclusion Strategy”

Jakarta, 17 Mei 2016 – Kementerian Keuangan, bersama-sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Islamic Research and Training Institute (IRTI), serta Islamic Development Bank (IDB), menyelenggarakan konferensi *1st Annual Islamic Finance Conference* pada tanggal 17 Mei 2016. Seminar yang diselenggarakan di sela-sela rangkaian acara Sidang Tahunan IDB ke-41 ini mengusung tema “*Sukuk for Infrastructure Financing and Financial Inclusion Strategy*”. Pemilihan tema ini sangat relevan dengan tema besar Sidang Tahunan IDB, yaitu “*Enhancing Economic Growth and Poverty Alleviation through Infrastructure Development and Financial Inclusion*”. Konferensi yang dibuka oleh Menteri Keuangan dan Presiden IDB ini menghadirkan pembicara yang berasal dari para pembuat kebijakan, regulator, akademisi, dan pelaku pasar keuangan syariah yang berpengaruh.

Dalam konferensi ini, tiga pembicara dari Kementerian Keuangan (Kepala BKF, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal) membagikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan Sukuk Negara. Indonesia tidak saja dikenal sebagai penerbit sukuk dalam denominasi USD terbesar di dunia, namun juga dikenal berhasil dalam menerbitkan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur (*project financing sukuk/project-based sukuk*) dan dalam menerbitkan Sukuk Ritel yang sangat mendukung program *financial inclusion*. Sementara itu, pembicara dari OJK (Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Pasar Modal I) membagikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan sukuk korporasi yang diakui masih belum berkembang dengan baik. Berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah dan program yang telah dan akan dilakukan oleh OJK menjadi bagian penting dari paparannya.

Dalam konferensi ini juga dibahas pengalaman Malaysia dan *Gulf Cooperation Countries* (GCC) dalam menerbitkan sukuk. Dato’ Noorizah Hj Abd Hamid (CEO Plus Malaysia Berhad) dan Neil D. Miller (Global Head of Islamic Finance-Linklaters, Dubai) membahas sukuk untuk pembiayaan infrastruktur di Malaysia dan GCC. Sementara itu Dr. Waled

Abdulwahab (Director of Infrastructure Department-IDB) menyajikan pengalaman pembiayaan infrastruktur negara-negara anggota IDB. Dalam konteks keperluan *credit enhancement* dalam penerbitan sukuk, khususnya sukuk korporasi, Adil Babiker (Director Legal and Claims Department, ICIEC-IDB) menyajikan mekanisme dan pengalaman ICIEC-IDB dalam memberikan fasilitas penjaminan penerbitan sukuk. Di antara kunci keberhasilan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur adalah kedalaman sektor keuangan (*financial deepening*) yang memungkinkan terserapnya sukuk bertenor panjang yang sejalan dengan karakteristik proyek infrastruktur.

Sementara itu, dalam konteks penerbitan sukuk ritel untuk *financial inclusion*, Indonesia diakui sangat *leading*. Sebagaimana dipaparkan oleh Rafe Haneef, CEO CIMB Islamic, Malaysia sendiri baru menyusun Kerangka Kerja Sukuk dan Bonds Ritel pada tahun 2012 yang berisi panduan bagi korporasi maupun entitas *sovereign* dalam menerbitkan sukuk ritel. Dalam konteks inovasi sukuk, pada tahun 2014 Malaysia juga menerbitkan Kerangka Kerja *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) sukuk, yakni sukuk yang mendukung tujuan-tujuan pembangunan sosial dan lingkungan.

Konferensi yang ditutup oleh Dr. Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisiner LPS ini juga diperkaya dengan sesi *morning lecture* dari Profesor Michael McMillen, akademisi dari University of Pennsylvania yang memaparkan aspek-aspek legal penerbitan sukuk, termasuk isu-isu legal yang masih dihadapi oleh beberapa yurisdiksi serta alternatif reformasi legalnya.

#

Untuk informasi lebih lanjut:

aifc@fiskal.depkeu.gso.id